



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 061/Kep.1510-Bagor/2026

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, tanggal 31 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Implementasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik terhadap ketercapaian Kegiatan Utama dan Indikatornya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tematik dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KELIMA : Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk disampaikan kepada Tim Penilai Nasional.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NP. 19760604 200604 1 002

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026

Indikator Penilaian	Capaian 2025	Satuan Target	Sasaran	Indikator Road Map	Permasalahan	Sasaran	Indikator Permasalahan	Target 2026	Satuan	Catatan	Rencana Aksi Prioritas	Indikator Output	Satuan Output	Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordin	
														TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN																						
Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	57,46	%	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Belum optimalnya budaya mutu dan keselamatan pasien	Terbentuknya/erbanggunnya budaya mutu dan keselamatan pasien	Presentase insiden keselamatan pasien yang belum di dokumentasikan	10	%	Laporan keselamatan pasien didokumentasikan	Penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkesenambungan	Jumlah laporan implementasi budaya mutu dan keselamatan pasien yang disusun	Laporan	3	3	3	3	12	Rp129.840.000,00	Presentasi pelaporan insiden keselamatan pasien	Dinas Kesehatan	
					Masih ada beberapa Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan standarisasi fasilitas kesehatan	Persentase capaian fasilitas pelayanan kesehatan yankes yang terpenuhi sarana dan prasarana sesuai standar	60	%	Pengadaan Sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan sarana, dokumen dan alat penunjang	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yankes yang terpenuhi sarana dan prasarana sesuai standar	Sarana dan prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan	-	-	-	48	48	19.521.204.896,97	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Fasilitas pelayanan kesehatan	
					Belum optimlnya Digitalisasi pelayanan kesehatan di puskesmas	Meningkatkan penerapan Digitalisasi pelayanan kesehatan di puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melaksanakan digitalisasi pelayanan kesehatan secara optimal	80	%	Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan Vendor yang berbeda-beda namun terintegrasi dengan satu sehat	Mengoptimalkan integrasi data pelayanan kesehatan dengan Platform SATUSEHAT Indonesia.	Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Digitalisasi pelayanan kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	50	60	70	80	80	3.739.561.766	Penggunaan Transformasi Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan SPBE	Dinas Kesehatan	

RENCANA AKSI REALISASI INVESTASI																					
Realisasi Investasi	11,363	Triliun	Nilai Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	Promosi PM																
					Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal yang terencana dan terdokumentasi untuk memperkuat daya tarik investasi daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Promosi Penanaman Modal	100	Persen	dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	Penguatan kegiatan promosi dan diseminasi informasi investasi Kota Bandung secara terpadu melalui sarana promosi dan event investasi	Jumlah pelaksanaan hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	2	2	5	2	11	Rp 1.049.589.375,67	Proses Bisnis	DPMPT SP
					Belum tersusunnya strategi pelaksanaan promosi penanaman modal	Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang komprehensif dan aplikatif sebagai acuan pelaksanaan promosi	Persentase tersusunnya dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	100	Persen	dokumen strategi promosi penanaman modal	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen strategi promosi penanaman modal	Dokumen	0	1	1	0	2	Rp 279.160.600	Proses Bisnis	DPMPT SP
					Masih Minimnya Pameran Bertaraf Internasional	Tersedianya Pameran Bertaraf Internasional Yang Lebih Banyak dan Bervariasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Pada Pameran Bertaraf Internasional	24	Pelaku Usaha/ Produk	Fasilitasi pelaku Usaha Pada Pameran Bertaraf Internasional	1. Pameran IFEX 2. Pameran TEI	Laporan Hasil Fasilitasi pelaku Usaha Pada Pameran Bertaraf Internasional	Pelaku Usaha/ Produk	0	0	0	24	24	Rp974.603.125,00	Proses Bisnis	DISDA GIN
					Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengikuti misi dagang secara mandiri	Meningkatnya pelaku usaha yang dapat mengikuti misi dagang secara mandiri	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Pada Misi Dagang	6	Pelaku Usaha/ Produk	Laporan Hasil Fasilitasi Misi Dagang	1. Pameran Bandung Week Market 2. Pameran Luar Negeri	Laporan Hasil Fasilitasi Misi Dagang	Pelaku Usaha/ Produk	0	0	0	7	7	Rp205.350.000,00	Proses Bisnis	DISDA GIN

					Tingkat jangkauan promosi pariwisata masih rendah	Meningkatnya jangkauan promosi pariwisata	Brand/citra pariwisata kota	4,18	Poin	Brand awareness pariwisata	1. Fasilitas kegiatan penguatan pemasaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bentuk pemasaran: 1. Pameran 2. Event 3. Media sosial (bulanan) 4. Fasilitas pendukung: cinderamata 5. dst. "	Kegiatan	0	1	2	1	4	Rp2.903.917.517,55	Proses Bisnis	DISBUD PAR
					Pelayanan PM																
					Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kemudahan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha di Kota Bandung	Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kemudahan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha di Kota Bandung	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kemudahan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha di Kota Bandung	100	Persen	penyelenggaraan pelayanan kemudahan berusaha secara elektronik kepada pelaku usaha di Kota Bandung	Pelayanan penanaman modal secara elektronik kepada pelaku usaha melalui Tatap Muka /Luring, Virtual/daring, SAKEDAP keliling dan Layanan tanpa turun/ drivethru	Laporan Triwulan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal kepada pelaku usaha	Dokumen	1	1	1	1	4	Rp 118.538.606,25	Proses Bisnis	DPMPT SP
					Diperlukannya pelayanan perizinan secara elektronik yang lebih optimal dan memudahkan masyarakat	Pelayanan perizinan online yang konsisten dan mudah diakses	Indeks Kualitas akses terhadap sistem informasi perizinan online	88	Nilai	Pemakaian Bandwith	Penyediaan internet bagi operasional sistem informasi perizinan online DPMPTSP	Jumlah Laporan Pemakaian Bandwith per bulan	Laporan	3	3	3	3	12	Rp 1.831.533.300,00	Teknologi dan Informasi	DPMPT SP

					Diperluakannya konsistensi terhadap Kepatuhan dan Menjaga Efektivitas Penerapan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Sistem Informasi perizinan online DPMPTSP mematuhi standar keamanan informasi	Penerapan standar sistem keamanan informasi	Kepatuhan terhadap standar keamanan informasi	Laporan		Konsultasi Pendampingan Surveilance dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Laporan Konsultasi Surveillance dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Laporan	0	0	2	0	2	Rp 95.434.640,00	Teknologi dan Informasi	DPMPT SP
					Perkembangan teknologi yang cepat menuntut pelayanan perizinan online untuk dilakukan pengembangan sesuai kemajuan dan kebutuhan pelayanan	Pengembangan sistem informasi perizinan mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan kebutuhan pelayanan	Persentase tersusunnya pengembangan sistem informasi perizinan online yang terupdate	100	Persen	Pengembangan sistem informasi perizinan	Pengembangan sistem informasi perizinan online dan Pengembangan framework backend	Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi perizinan online	Dokumen	0	0	1	1	2	Rp 165.406.650,00	Teknologi dan Informasi	DPMPT SP
					Pengembangan Potensi PM dan Hilirisasi																
					Belum optimalnya potensi investasi yang terpetakan	Meningkatnya cakupan peta potensi investasi	Persentase cakupan peta potensi investasi	100	Persen	Cakupan peta potensi investasi	Penyusunan kajian potensi dan peluang penanaman modal	Jumlah kajian mengenai potensi dan peluang penanaman modal	Dokumen	0	0	0	2	2	Rp. 384.998.422,30	Proses Bisnis	DPMPT SP

											Penyusunan draft RUPM	Jumlah Dokumen RUPM	Dokumen	0	0	0	1	1	Rp. 164.975.578,70	Proses Bisnis	DPMPT SP
											Pemutakhiran data informasi pada PIR (web BKPM)	Jumlah data informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal yang dimutakhirkan	Dokumen	0	0	1	0	1	Rp. 15.060.926,50	Proses Bisnis	DPMPT SP
					Belum adanya peraturan yang mengatur berupa insentif dan kemudahan dari dinas teknis terkait sehingga belum terselesaikannya draft Raperwal Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan kepada pelaku usaha sesuai kewenangannya, belum adanya kesadaran penuh setelah disosialisasi	Optimalisasi koordinasi mengenai kesiapan peraturan yang mengatur insentif dan kemudahan dari dinas teknis terkait	Persentase penyelesaian bahan kebijakan penyusunan insentif	100	Persen	Bahan Kebijakan Penyusunan Insentif	Asistensi dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal,	Jumlah laporan hasil koordinasi antar Perangkat Dinas dalam Pemberian Fasilitas/Insentif	Laporan	0	0	1	1	2	Rp. 79.022.200	Proses Bisnis	DPMPT SP

					kan bahwa Usaha Besar wajib bermitra dengan UMKM setempat.																
											Koordinasi dengan Usaha besar dan UMKM dan perlu dukungan dari pemerintah pusat.	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	2	4	5	0	11	Rp. 14.297.500	Proses Bisnis	DPMPT SP
					Pengawasan PM																
					Belum optimalnya Kepatuhan pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	Persentase pengawasan penanaman modal sesuai NSPKI	100	Persen	Hasil Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan/Inspeksi Lapangan Penanaman Modal kepada pelaku usaha.	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengawasan penanaman modal	Laporan	0	1	0	1	2	Rp 106.039.200	Pengawasan	DPMPT SP
					Pembinaan PM																
					Belum optimalnya Kepatuhan pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	Persentase pembinaan penanaman modal sesuai NSPKI	100	Persen	Hasil Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pelaku usaha	Melaksanakan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasi	Jumlah laporan kegiatan penyelesaian permasalahan yang di hadapi pelaku usaha terhadap ketentuan modal	Laporan	0	1	0	1	2	Rp 22.640.000	Pengawasan	DPMPT SP

											ikan kegiatan usahanya										
					Belum optimalnya Kepatuhan pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	Persentase Pembinaan Penanaman Modal sesuai NSPKI	100	Persen	Hasil Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Melaksanakan Bimbingan teknis/ Sosialisasi /Klinik / Coaching terkait PM dan PTSP	Jumlah Laporan Kegiatan pembinaan ketentuan penanaman modal	Laporan	0	2	2	1	5	Rp 174.573.350	Pengawasan	DPMPTSP
					Kapasitas parkir di pusat kota sudah tidak memadai, menimbulkan parkir liar	Menganalisis kebutuhan Park and Ride berdasarkan pola perjalanan, demand parkir, dan lokasi strategis.	Jumlah dokumen kajian park and ride	1	Dokumen	1. Dokumen Jasa Konsultasi DED Penyusunan Park and Ride 1	kajian teknis dan penyusunan DED Park and Ride sebagai dasar pembangunan fasilitas parkir terpadu yang mendukung integrasi angkutan umum dan pengurangan kemacetan	Jumlah dokumen kajian park and ride	Dokumen	0	0	0	1	1	Rp96.718.740,00	Proses Bisnis	DISHUB
					Belum adanya kajian untuk pengembangan rute	Tersedianya kajian pengembangan rute	Jumlah dokumen kajian pengembangan rute	4	Dokumen	dokumen kajian rerouting angkot 1 - 4	Pengembangan terkait rute baru dan lama	Jumlah kajian dan biaya operasional terkait perencanaan dan pengembangan rute	Dokumen	0	0	2	2	4	Rp296.370.000,00	Proses Bisnis	DISHUB
					Belum adanya klasifikasi pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha di kota Bandung	Tersedianya dokumen kebijakan dalam pemberian insentif fiskal dan kemudahan perpajakan daerah	Jumlah Dokumen kebijakan insentif fiskal/ kemudahan perpajakan daerah	1	Dokumen	Draft/Raperwal insentif fiskal dan kemudahan perpajakan daerah	Menyusun dan mengkaji serta mengklasifikasi kebijakan terkait pemberian insentif fiskal/kemudahan perpajakan daerah bagi pelaku usaha	Jumlah dokumen kebijakan pemberian insentif fiskal dan kemudahan perpajakan daerah	Dokumen	0	0	1	0	1	Rp99.000.000,00	Proses Bisnis	BAPEN DA
					Belum optimalnya publikasi program di media	Meningkatnya publikasi program di media massa dan online	Kurangnya publikasi investasi di Kota Bandung	8	kali/tayang	hasil penayang an bisa di media sosial	Publikasi program di media massa dan online	Jumlah publikasi program melalui media	Penayangan publikasi	2	2	2	2	8	Rp100.000.000,00	Kegiatan	DISKOMINFO

							melalui media massa dan online			ataupun online		massa dan online									
					Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap standar usaha belum optimal	Meningkatnya tingkat kepatuhan UJP terhadap standar usaha	Persentase usaha jasa pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	39,1	%	UJP yang memenuhi standar usaha pariwisata berkelanjutan	Pembinaan (workshop , bimtek, dan money) usaha jasa pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Usaha Jasa Pariwisata a	30	30	30	30	150	Rp500.000.000,00	Proses Bisnis	DISBUD PAR
					Promosi Bagi Pelaku Usaha Non Formal																
					Pengembangan UMKM	Meningkatnya promosi bagi UMKM di Kota Bandung	Kurangnya Promosi bagi pelaku UMKM di Kota Bandung	1	Kegiatan		Melaksanakan Event Bandung Fair	Laporan Terlaksananya Event Bandung Fair	Kegiatan	0	0	0	1	1	Rp282.953.750,00	Inovasi	DiskopU KM
					Pengembangan UMKM																
					Belum optimalnya Promosi dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Mikro	Terlaksananya Promosi dan pemasaran bagi Pelaku usaha Mikro	Keterbatasan akses pasar	1	Kegiatan	Pelaku Usaha Mikro	Fasilitasi Galeri Salapak Microshop	Jumlah Tersedianya Galeri Salapak untuk Promosi dan Pemasaran Poduk	Unit	1	0	0	0	1	Rp999.022.926,00	Proses Bisnis	DiskopU KM
					Belum optimalnya Promosi dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Mikro	Terlaksananya Promosi dan pemasaran bagi Pelaku usaha Mikro	Keterbatasan akses pasar	1	Kegiatan	Pelaku Usaha Mikro	Melaksanakan Pameran APEKSI 2026	Jumlah Terlaksananya Pameran Apeksi 2026	Kegiatan	0	1	0	0	1	Rp285.550.280,00	Proses Bisnis	DiskopU KM
					Promosi Produk Koperasi	Meningkatnya Promosi bagi Produk Koperasi	Keterbatasan akses pasar	1	Kegiatan		Mengikuti Pameran hari Koperasi Tahun 2026	Jumlah Terlaksananya Keikutsertaan Pameran dalam rangka Hari Koperasi 2026	Kegiatan	0	1	0	0	1	Rp. 43.000.000,00.	Proses Bisnis	DiskopU KM
					Kurangnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	32.03	Persen		Melaksanakan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi berdasarkan klaster kompetensi	Orang	0	160	180	180	520	4.699.936.200,00	Sumber Daya Manusia	Disnaker

											Melaksana kan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasark an Unit Kompeten si	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi berdasarkan unit kompetensi	Orang	1200	4440	4840	3900	1438 0	67.180.882 .777,00	Sumbe r Daya Manusi a	Disnake r
					Kurangnya Kesempata n Kerja dan Penempata n Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Penempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	53	Persen		Menciptak an tenaga kerja mandiri (Wirasaha a Baru)	Jumlah calon tenaga kerja mandiri wirasaha baru	Orang	800	2860	3220	2500	9380	41.789.933 .361,64	Sumbe r Daya Manusi a	Disnake r
					Kurangnya konduktivitas hubungan industrial di Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Hubungan industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	81	Persen		Melaksana kan Mediasi Perselsih an kasus Hubungan Industrial	Jumlah perkara perselsihan yang terselesaikan	Perkara	7	8	10	12	37	150.600.00 0,00	Proses Bisnis	Disnake r
											Perusaha an menyusun Peraturan Perusaha an	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusah aan	15	25	30	35	105	112.761.80 0,00	Proses Bisnis	Disnake r
											Pendaftar an Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusah aan	1	1	1	2	5	99.720.000 ,00	Proses Bisnis	Disnake r
											Pembinaa n LKS Tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	1	1	1.536.452. 980,00	Proses Bisnis	Disnake r

					Kurangnya Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kota Bandung	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	61.30	Persen		Mengeluarkan rekomendasi skala upah	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan/ Dokumen	3	3	3	3	12	527.872.800,00	Proses Bisnis	Disnaker
											Sosialisasi Jamsostek dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah orang/perusahaan yang mengikuti sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang/Perusahaan	0	100	100	100	300	1.911.158.015,00	Proses Bisnis	Disnaker
					Masih kurangnya infrastruktur pengolahan sampah tingkat kota	Beroperasinya infrastruktur pengolahan sampah	Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang dibangun dan dioperasikan	5	lokasi		Mengolah sampah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan ulang	Jumlah TPST yang beroperasi	Lokasi	1	2	2	3	8	Rp9.861.795.000,00	Proses Bisnis	DLH
					Hasil pengolahan sampah belum dimanfaatkan dengan optimal	Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah	Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan	2	kerjasama	Kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lainnya terkait penyediaan infrastruktur maupun pemanfaatan hasil pengolahan dari infrastruktur yang ada	Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengolahan sampah yang ramah lingkungan	Jumlah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan produk hasil pengolahan sampah yang dibuat	Dokumen Perjanjian Kerjasama	-	-	1	1	2	Rp184.000.000,00	Proses Bisnis	DLH
					Kewajiban pengkajian dampak lingkungan melalui penyusunan AMDAL atau UKL/UPL masih banyak dilanggar	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban pengkajian dampak lingkungan melalui AMDAL atau UKL/UPL	Jumlah Laporan penyelenggaraan fasilitasi dokumen lingkungan	4	laporan triwulan	Laporan Triwulan berisi daftar pelaku usaha yang mengajukan persetujuan lingkungan	Penerbitan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan untuk ljin Berusaha	Jumlah penerbitan Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Pemerintah	Dokumen Amdal, UJL/UPL dan SPPL	100	100	100	100	400	Rp350.000.000,00	Proses Bisnis	DLH

									/kelayakan lingkungan												
					Belum adanya pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada PM yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup	Tersedianya penghargaan bagi Penanam Modal yang melakukan upaya pelestarian lingkungan	Jenis penghargaan untuk PM	1	Penghargaan	Penghargaan merupakan salah satu jenis insentif	Pemberian penghargaan kepada Pelaku Usaha	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah	-	-	78	-	78	Rp1.700.000.000,00	Proses Bisnis	DLH
					Masih banyak pelaku usaha yang belum terkoneksi dengan pemasaran secara online	Meningkatnya pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan e-commerce	75	orang	Laporan Kegiatan Pelatihan	Pelatihan Digitalisasi Marketing	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Orang	0	75	0	0	75	Rp50.000.000,00	SDM	DISDAGIN
					Pengembangan Infrastruktur																
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan Infrastruktur SDA sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan Infrastruktur SDA	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan Infrastruktur SDA tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Menyusun dokumen DED Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Kolam Retensi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen		2	1	2	5	Rp461.427.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan Infrastruktur SDA sebagai penunjang	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan Infrastruktur SDA	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan Infrastruktur SDA tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pengendalian Daya Rusak Air	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Air disusun	Dokumen	2	8	5	7	22	Rp1.571.035.920,00	Lain-lain	DSDAB M

[illegible]

					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Saluran Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	meter	2.78 7,75	6.50 4,75	3.71 7,00	5.57 5,50	18.58 5,00	Rp1.236.43 8.560,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Menyusun dokumen DED Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase dan dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen		3	2	3	8	Rp2.600.01 7.340,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Mengelola Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen			1	1	2	Rp305.154. 540,00	Lain-lain	DSDAB M

					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Menyusun DED Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3	9	5	8	25	Rp4.696.118.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	kilometer	5,95	13,89	7,94	11,9	39,68	Rp4.696.118.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Melaksanakan Survei Kondisi Jalan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	kilometer	147,68	344,58	196,91	295,36	984,53	Rp1.254.003.630,00	Lain-lain	DSDAB M

					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Menyusun DED Penyelenggaraan Trotoar	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3	9	5	8	25	Rp4.696.118.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum idealnya perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang optimalisasi aksesibilitas penggerak kegiatan ekonomi	Terwujudnya perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan	Persentase dokumen perencanaan dan pengawasan infrastruktur jalan tersusun sesuai NSPK	100	Persen	Jumlah realisasi dokumen perencanaan dan pengawasan disusun dibagi target jumlah dokumen	Melaksanakan Survei Kondisi Trotoar	Panjang Trotoar yang Disurvey Kondisinya	wilayah	45	105	60	90	300	Rp98.858.820,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	kilometer	5,94	13,86	7,92	11,88	39,6	Rp104.402.926.074,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan	Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan			1	1	2	Rp12.000.000.000,00	Lain-lain	DSDAB M

									infrastruktur												
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	kilometer	19,5 5	45,6 2	26,0 7	39,1 1	130,3 5	Rp25.823.549.266,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan Rehabilitasi Jalan Insidentil	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	kilometer	0,63	1,47	0,84	1,26	4,2	Rp5.808.281.745,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan Pengujian Mutu Bahan Konstruksi Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	paket	15	35	20	30	100	Rp135.390.153,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Trotoar	Panjang Trotoar yang Dipelihara Secara Berkala	kilometer	1,36	3,18	1,82	2,73	9,09	Rp999.946.000,00	Lain-lain	DSDAB M

					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan Rehabilitasi Trotoar	Panjang Trotoar yang Direhabilitasi	kilometer	1,38	3,22	1,84	2,76	9,19	Rp20.402.252.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Meningkatkan kualitas kolam retensi eksisting	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	-	-	1	1	2	Rp200.000.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas Infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Merehabilitasi Kolam Retensi eksisting	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit	-	-	1	1	2	Rp200.000.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Menormalisasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	kilometer	0,6	1,4	0,8	1,2	4	Rp2.058.375.605,00	Lain-lain	DSDAB M

					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Merehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	kilometer	0,36	0,84	0,48	0,72	2,4	Rp39.904.666.765,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Memelihara Sumur Imbuhan Dalam	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	10	27	15	23	75	Rp1.022.926.966,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas Infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan pemeliharaan rutin Daerah Aliran Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	kilometer	6,75	15,75	9	13,5	45	Rp3.602.206.846,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Merehabilitasi Saluran Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	meter	2.198,55	5.129,95	2.931,40	4.397,10	14.657,00	Rp24.379.501.000,00	Lain-lain	DSDAB M

					Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Terpeliharanya kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Persentase pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pemeliharaan infrastruktur dibagi jumlah rencana aksi pemeliharaan infrastruktur	Melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase	Panjang saluran drainase dipelihara rutin	meter	18.600,00	43.400,00	24.800,00	37.200,00	124.000,00	Rp4.391.992.923,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur jalan yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur jalan terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan	Melaksanakan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	kilometer	0,01	0,03	0,02	0,02	0,08	Rp1.000.000.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur jalan yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur jalan terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan	Melaksanakan Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang Dibangun	kilometer	0,83	1,94	1,11	1,67	5,55	Rp12.084.564.000,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur SDA yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur SDA yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur SDA terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA	Membangun Kolam Retensi baru	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit		1	1	2		Rp10.725.400.000,00	Lain-lain	DSDAB M

					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur SDA yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur SDA yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur SDA terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA	Membangun Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit			1	1	2	Rp12.049.455.181,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur SDA yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur SDA yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur SDA terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA	Melindungi kawasan resapan pada sempadan sungai dan sempadan mata air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit		4	2	3	9	Rp4.481.682.459,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur SDA yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur SDA yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur SDA terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA	Membangun Sumur Imbuhan Dalam	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	3	12	7	10	32	Rp7.833.905.697,00	Lain-lain	DSDAB M
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur sistem drainase perkotaan yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur sistem drainase perkotaan yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur sistem drainase perkotaan terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur sistem drainase perkotaan dibagi jumlah rencana aksi pembangunan	Membangun Saluran Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	meter	589,2	1.374,80	785,6	1.178,40	3.928,00	Rp6.533.580.000,00	Lain-lain	DSDAB M

										nan infrastrukt ur sistem drainase perkotaan											
					Belum optimalnya pembangunan infrastruktur sistem drainase perkotaan yang terintegrasi	Terbangunnya infrastruktur sistem drainase perkotaan yang terintegrasi	Persentase pembangunan infrastruktur sistem drainase perkotaan terlaksana sesuai rencana	100	Persen	Jumlah capaian rencana aksi pembangunan infrastruktur ur sistem drainase perkotaan dibagi jumlah rencana aksi pembangunan infrastruktur ur sistem drainase perkotaan	Membuat sumur resapan drum pori	Jumlah sumur resapan drum pori dibuat	Unit	225	525	300	450	1500	Rp931.551.367,00	Lain-lain	DSDAB M
					Pasca penetapan Perwal No. 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044, diperlukan upaya sosialisasi secara berkesinambungan dalam rangka memberikan pemahaman substansi RDTR kepada masyarakat luas.	Pelaksanaan sosialisasi substansi RDTR diharapkan dapat menunjang pemahaman publik dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang	Tersedianya sistem aplikasi sosialisasi secara elektronik	1	Aplikasi	Kegiatan ini adalah pengembangan Sistem Informasi Rencana Kota secara online. Meliputi tahap perencanaan awal, meliputi identifikasi kebutuhan fitur, pemetaan data spasial yang akan diintegrasikan, serta penyusunan kerangka kerja sistem. Selain itu, proses pengumpulan dan verifikasi data pendukung dari perangkat	Menyusun sistem aplikasi sosialisasi RDTR secara elektronik	Laporan sistem Informasi Rencana Kota secara online	Aplikasi	0	0	0	1	1	Rp972.329.080	Teknologi dan Informasi	DICIPTABINTAR

									daerah terkait.												
					Pasca penetapan Perwal No. 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044, diperlukan upaya sosialisasi secara berkesinambungan dalam rangka memberikan pemahaman substansi RDTR kepada masyarakat luas.	Pelaksanaan sosialisasi substansi RDTR diharapkan dapat menunjang pemahaman publik dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang	Tersedianya laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1	Laporan	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perlu dilakukan pembaruan (update) untuk memastikan kesesuaian pengaturan ruang dengan kondisi eksisting serta dinamika pembangunan kota.	Menyusun dokumen sosialisasi RDTR	Jumlah dokumen sosialisasi RDTR	laporan	0	0	0	1	1	Rp490.217.000,00	Pengawasan	DICIPTABINTAR
					Masih terjadi ketidaksepahaman, perbedaan standar perencanaaan antara perencanaan dokumen teknis bangunan dengan TPA dan TPT yang mengakibatkan beberapa dokumen tidak mendapat SPST	Tersedianya dokumen PBG	Jumlah Dokumen PBG melalui SIMBG	1	Dokumen	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang berfungsi memastikan bahwa setiap pembangunan memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian dengan tata ruang.	Pemberian izin yang meliputi aspek pemanfaatan ruang	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	0	0	0	1	1	Rp1.276.000.000,-	Pengawasan	DICIPTABINTAR

					Tidak memiliki data masterplan terkait lokasi yang strategis untuk penataan PKL	Tersedianya desain lokasi penataan PKL	Jumlah dokumen desain penataan PKL			Ketersediaan desain lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan elemen strategis dalam mewujudkan keteraturan, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di ruang publik	Penataan bangunan dan lingkungan yang strategis	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah	Dokumen						Rp293.000.000	Perencanaan	DICIPTABINTAR
RENCANA AKSI PENGENTASAN KEMISKINAN																					
Indikator Penilaian	Capaian 2025	Satuan Target	Sasaran	Indikator Road Map	Permasalahan	Sasaran	Indikator Permasalahan	Target 2026	Satuan	Catatan	Rencana Aksi Prioritas	Indikator Output	Satuan Output	Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator
														TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
Pengentasan Kemiskinan	3.68	%	Meningkatnya Pembangunan Inklusif	Tingkat Kemiskinan																	Dinsos dan PD Terkait
					Masih adanya PPKS terlarut yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kabupaten/Kota	600	Orang		Melakukan respon kedaruratan atas pengaduan masyarakat serta penjangkauan PPKS terlarut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kabupaten/Kota	Orang	150	150	150	150	600	Rp722,725,400.00	Sumber Daya Manusia	

					Masih adanya masyarakat miskin dan rentan yang belum mengetahui tentang layanan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pengusulan DTSEN untuk anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan pengemis	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten	8000	Orang		Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak atas informasi serta menindaklanjuti pengaduan terkait penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten	Orang	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Rp285,941,580.00	Teknologi dan Informasi	
					Masih adanya disabilitas terlantar yang belum memiliki alat bantu sehingga menyebabkan keterbatasan mobilitas yang mengganggu partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peerage Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1063	Orang		Pemberian alat bantu mobilitasi bagi para penyandang disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peerage Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	1,063	0	1,063	Rp2,968,798,115.00	Sumber Daya Manusia	
					Masih terdapat keluarga miskin dan rentan yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya	Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	1586	Orang		Pemberian bantuan pangan daerah bagi keluarga miskin yang terdaftar pada Desil 1-5 yang belum memperoleh bantuan	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	keluarga	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	Rp8,547,047,946.00	Sumber Daya Manusia	

					Kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial PPKS yang belum baik	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Orang		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi para PPKS terlanter	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	125	125	125	125	500	Rp886,284,296.00	Sumber Daya Manusia	
					Perlunya penguatan pendampingan keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang		Pemberian bimbingan sosial bagi keluarga PPKS terlanter yang dilaksanakan oleh para pekerja sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50	25	0	75	Rp37,521,300.00	Sumber Daya Manusia	
					Terbatasnya ketersediaan makanan bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	Terpenuhinya kebutuhan pemakanan dasar korban bencana selama masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4650	Orang		Pemberian makanan dan bahan makanan bagi korban terdampak bencana selama masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1,162	1,162	1,163	1,163	4,650	Rp471,755,496.00	Sumber Daya Manusia	
					Terbatasnya ketersediaan pakaian dan kelengkapan lainnya bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana	Terpenuhinya kebutuhan sandang dasar korban bencana selama masa tanggap darurat	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	110	Orang		Pemberian pakaian dan kelengkapan sandang lainnya bagi korban terdampak bencana selama masa tanggap darurat	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	Orang	27	27	28	28	110	Rp110,976,569.00	Sumber Daya Manusia	

					Beragamnya usia dan kondisi kesehatan klien UPTD Rumah Singgah, sehingga diperlukan sandang yang sesuai	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1200	Orang		Penyediaan pakaian dan kelengkapan sandang lainnya bagi PPKS terlantar yang berada di UPTD Rumah Singgah	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	300	300	1,200	Rp554,786,258.00	Sumber Daya Manusia	
					Beragamnya usia dan kondisi kesehatan klien UPTD Rumah Singgah, sehingga diperlukan permakanaan yang sesuai serta dapat memenuhi Standar Gizi Minimal	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1200	Orang		Penyediaan permakanan bagi PPKS terlantar yang berada di UPTD Rumah Singgah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	300	300	1,200	Rp2,681,851,560.00	Sumber Daya Manusia	
					Rendahnya pendapatan warga miskin	Meningkatnya pendapatan warga miskin	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	290	Orang		Pemberian Pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan usaha ekonomi bagi Masyarakat Miskin, serta monitoring dan pendampingan.	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Orang	113	52	125	0	290	Rp1,647,306,000.00	Sumber Daya Manusia	

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

